

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, sektor keuangan, khususnya perbankan, memegang peran yang sangat krusial. Perbankan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan sektor riil melalui penyaluran dana secara efisien dan produktif. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ keberlangsungan perbankan menjadi komponen esensial dalam memperkuat ketahanan dan mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Di Indonesia, sistem perbankan terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).² Khusus untuk BPR yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dikenal dengan istilah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²Anisa Dwi Utami et al., "Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Al-Muzara'Ah* 11, Vol. 4, No. 4, 2022, h. 47.

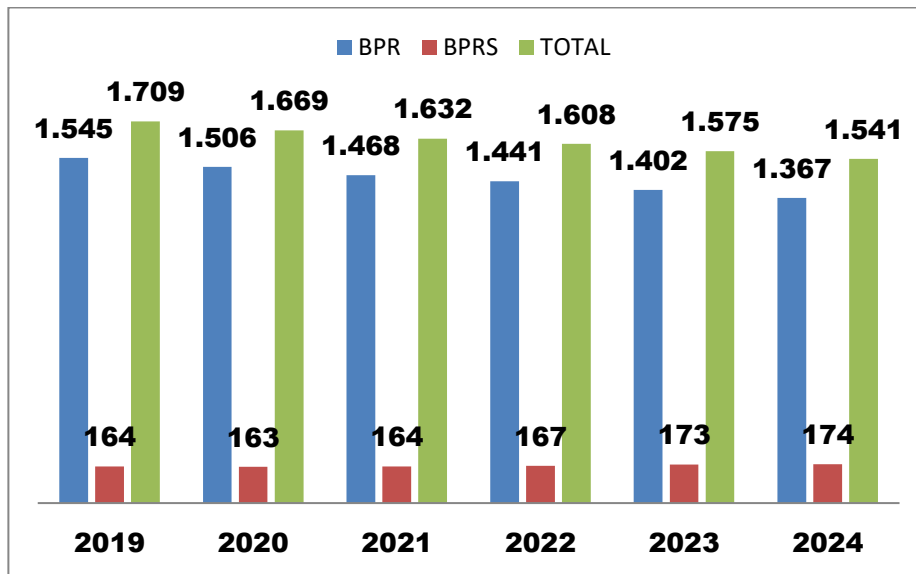
syariah.³ BPRS berfokus pada pendanaan dan pembiayaan sektor riil dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan.

BPRS hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang bebas dari sistem bunga, dengan pendekatan etis dalam transaksi keuangan. Kehadiran BPRS berkontribusi besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh permodalan dari lembaga keuangan konvensional.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah BPRS di Indonesia terus meningkat, hal ini mencerminkan peningkatan kebutuhan dan penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Namun, di balik trend positif tersebut terdapat fenomena kebangkrutan yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan operasional BPRS. Dalam memahami ancaman kebangkrutan tersebut, penting melihat perkembangan BPRS secara bersamaan dengan BPR, karena keduanya memiliki segmen pasar yang serupa, yaitu masyarakat mikro dan UMKM. pendekatan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang stabilitas dan potensi kebangkrutan pada industri perbankan mikro. Berikut data perkembangan jumlah BPR dan BPRS yang dapat dilihat pada gambar 1.1:

³ Rina Maulina et al., “Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm (Studi Pada Pt. Bprs Baiturrahman),” *Jurnal Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 107.

⁴ Nadhea Jelita Pertiwi et al., “Analisis Strategi Bank Syariah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 5, 2024, h. 8109.



Sumber: OJK, data diolah

Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah BPR dan BRPS Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatas, jumlah BPR mengalami penurunan signifikan dari 1.545 unit pada tahun 2019 menjadi 1.367 unit pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah BPRS mengalami peningkatan, dari 164 unit pada 2019 menjadi 174 unit pada tahun 2024. Secara keseluruhan, total gabungan BPR dan BPRS menurun dari 1.709 menjadi 1.541 unit dalam periode yang sama. Penurunan jumlah BPR secara konsisten setiap tahunnya dapat menjadi indikasi adanya permasalahan fundamental. Begitu juga dengan BPRS, walaupun jumlahnya relatif kecil kondisi ini menunjukkan bahwa BPRS tidak lepas dari risiko kegagalan dan kebangkrutan, sehingga memerlukan perhatian dan upaya pengelolaan risiko yang lebih komprehensif. Berikut data BPR dan BPRS yang mengalami kebangkrutan 2019-2024 yang disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
BPR BPRS Bangkrut 2019-2024

BPR			BPRS	
2019	1.	BPR Jabal Tsur	1.	BPRS Safir Bengkulu
	2.	BPR Pancadana	2.	BPRS Muamalat Yotefa
	3.	BPR Legian	3.	BPRS Hareukat
	4.	BPR Efiti Dana Sejahtera	4.	BPRS Jabal Tsur
	5.	BPR Calliste Bestari		
	6.	BPR Fajar Artha Makmur		
2020	1.	BPR Tebas Loka rizki	1.	BPRS Gotong Royong
	2.	BPR Sekar		
	3.	BPR Lugano		
	4.	BPR Brata Nusantara		
	5.	BPR Artaprima Danajasa		
	6.	BPR Stigma Andalas		
	7.	BPR Nurul Barokah		
2021	1.	BPR Sewu Bali	1.	BPRS Asri Madani Nusantara
	2.	BPR LPN Tapan		
	3.	BPR Bina Barumun		
	4.	BPR Sumber Usahawan Bersama		
	5.	BPR Utomo Widodo		
2022	1.	BPR Pasar Umum		
2023	1.	BPR Bagong Inti Marga		
	2.	BPR Karya Remaja Indramayu		
	3.	BPR Indotama UKM Sulawesi		
	4.	BPR Persada Guna		
2024	1.	BPR wijayakusuma	1.	BPRS Mojo Artho Perseroda
	2.	BPR Usaha Madani Karya Mulia	2.	BPRS Saka Dana Mulia
	3.	BPR Bank Pasar Bhakti	3.	BPRS Kota Juang Perseroda
	4.	BPR Bank Purworejo		
	5.	BPR ECCASH		
	6.	BPR Aceh Utara		
	7.	BPR Sembilan Mutiara		
	8.	BPR Bali Artha Anugrah		
	9.	BPR Dananta		
	10.	BPR Bank Jepara Artha		
	11.	BPR Lubuk Raya Mandiri		
	12.	BPR Sumber Artha Waru Agung		
	13.	BPR Nature Primadana Capital		
	14.	BPR Duta Niaga		
	15.	BPR Pakan Rabaa Solok Selatan		
	16.	BPR Kencana		
	17.	BPR Arfak Indonesia		

Sumber: data diolah dari LPS

Berdasarkan data dari tabel di atas, jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang bangkrut meningkat signifikan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 6 BPR dan 3 BPRS yang dinyatakan bangkrut. Pada tahun 2020, jumlah BPR yang bangkrut meningkat menjadi 7, sementara BPRS sebanyak 1. Tahun 2021 mencatat 5 BPR dan 1 BPRS yang bangkrut, disusul oleh 1 BPR pada tahun 2022, 4 BPR pada tahun 2023, serta lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan kebangkrutan 17 BPR dan 3 BPRS, dan terbaru di tahun 2025 terdapat 1 BPRS yang dinyatakan bangkrut di Sumatera Bagian Utara Yaitu BPRS Gebu Prima, kebangkrutan tersebut dikarenakan tingkat permodalan dan kesehatan tidak sesuai dengan yang seharusnya.⁵ Kebangkrutan ini tentunya berdampak besar, baik bagi pemegang saham, nasabah, maupun sistem keuangan secara luas.

Kebangkrutan adalah kegagalan sebuah perusahaan dalam menjalankan kewajiban perusahaan untuk menghasilkan laba.⁶ Sedangkan menurut Masdianti dan Warasniasih kebangkrutan adalah suatu kegagalan yang terjadi dalam perusahaan, apabila perusahaan tersebut mengalami Kegagalan dalam arti ekonomi (*Economic Distressed*) yaitu dimana perusahaan kehilangan uang

⁵ detikFinance, "Bank Bankrut tambah lagi OJK cabut izin BPRS Gebu Prima" <https://finance.detik.com/moneter/d-7877325/bank-bangkrut-tambah-lagi-ojk-cabut-izin-bprs-gebu-prima> di akses pada tanggal 7 april 2025.

⁶ Rofinus Leki Rofinus Leki, Asruni Suaidi, and M.Zaid Abdurrahman M.Zaid Abdurrahman, "Penerapan Model Altman Z-Score Dalam Mengukur Potensi Kebangkrutan (Financial Distress) (Studi Kasus Pada Pt, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Data Laporan Keuangan Tahun 2016 & 2017)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 6, no. 1 (2020): 115–27, <https://doi.org/10.35972/jieb.v6i1.324>.

atau pendapatan perusahaan sehingga tidak mampu menutupi biayanya sendiri dan Kegagalan dalam arti keuangan (*Financial Distressed*) yaitu keadaan dimana perusahaan kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja.⁷

Berikut data jumlah BPRS di Provinsi D.I Yogyakarta 2019-2024

Tabel 1. 2

Jumlah BPRS di Provinsi D. I Yogyakarta

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	12	12	12	12	13	13

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2019-2024 di OJK

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Jumlah BPRS di Yogyakarta meningkat dari 12 unit pada tahun 2019–2022 menjadi 13 unit pada tahun 2023-2024. Meskipun terdapat penambahan BPRS, hal ini tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang sehat atau stabil, justru pada kenyataannya dari kondisi keuangan dan operasional beberapa BPRS sempat mengalami tekanan finansial dan masalah manajemen risiko yang mengarah pada kondisi kebangkrutan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus BPRS di Yogyakarta, yaitu BPRS Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia yang sempat berada dalam pengawasan khusus oleh OJK karena kinerja yang tidak baik sehingga mengalami tekanan likuiditas dan operasional.⁸ Selain itu, BPRS Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia

⁷Putu Riesty Masdiantini and Ni Made Sindy Warasniasih, “Laporan Keuangan Dan Prediksi Kebangkrutan Perusahaan,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (2020): 196,

⁸ Jogpaper.net, “Dulu Dalam Pengawasan OJK, kini BPRS Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta”, <https://www.jogpaper.net/dulu-dalam-pengawasan-ojk-kini-bprs-hik-mci-terbaik-di-diy/> di akses pada tanggal 22 Mei 2025.

diawasi karena angka kredit bermasalahnya tinggi, dengan nilai Non Performing Loan (NPL) nya lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan OJK yaitu, maksimal sebesar 5%.⁹

Kondisi diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah BPRS tidak selalu sejalan dengan kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap laporan keuangan BPRS guna mengidentifikasi potensi risiko kebangkrutan sejak dini. Deteksi dini ini berperan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi masalah keuangan yang mungkin timbul, sehingga pengelola BPRS dan pihak regulator dapat mengambil tindakan yang tepat sebelum kondisi menjadi lebih parah.

Untuk mengidentifikasi potensi kebangkrutan sejak dini, diperlukan analisis yang mendalam terhadap laporan keuangan, yang mencakup perhitungan dan interpretasi rasio keuangan dalam mencerminkan kinerja dan kondisi finansial perusahaan.¹⁰ Rasio keuangan tersebut menjadi dasar perhitungan dalam metode prediksi kebangkrutan, yaitu metode Altman Z-Score, Zmijewski, dan Grover.

Metode Altman Z-Score merupakan metode analisis yang menggunakan lima rasio keuangan dalam laporan keuangan untuk

⁹ Harian Jogja, "Perbankan Jogja: NPL Tinggi, OJK awasi satu BPRS di DIY" <https://ekbis.harianjogja.com/perbankan-jogja-npl-tinggi-ojk-awasi-satu-bprs-di-diy>

¹⁰ 8Fambia Noor Azizah and Hexana Sri Lastanti, "Analisis Kebangkrutan Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2020 Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2, no. 2 (2022): 1357–64, <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14831.8>.

menciptakan alat prediksi kebangkrutan suatu perusahaan.¹¹ bagi BPRS, penerapan metode ini menjadi penting sebagai alat pengawasan internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa bank tetap berada dalam kondisi yang sehat serta mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Zmijewski merupakan metode analisis yang menekankan pada kemampuan perusahaan dalam bertahan dari tekanan keuangan jangka panjang seperti rasio yang mengukur profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas untuk memprediksi kebangkrutan.¹² metode ini relevan untuk mengevaluasi ketahanan BPRS terhadap risiko finansial, terutama mengingat karakteristik usaha BPRS yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan ketergantungan pada kualitas pembiayaan.

Grover merupakan metode analisis yang diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap metode Altman Z-score.¹³ metode ini dikembangkan untuk melengkapi metode prediksi kebangkrutan sebelumnya yaitu Altman.

Alasan dilakukannya penelitian ini bahwa masih minimnya penelitian yang secara khusus menyoroti potensi kebangkrutan BPRS, sedangkan keberadaan BPRS berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi

¹¹ Muhammad Rizal Affandi and Rita Meutia, "Analisis Potensi Financial Distress Dengan Menggunakan Altman Z Score Pada Perusahaan Penerbangan (Dampak Pandemi Covid-19 Dengan Penutupan Objek Wisata Dan Psbb)," *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 55.

¹² Heny Endah Sari dan Vivi Ariyani, "Analisis Perbandingan Potensi Kebangkrutan Perusahaan Manufaktur Periode 2020 Dengan Model Altman, Springate, Dan Zmijewski," *JRMA | Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 10, No. 1, 202, h. 32..

¹³Rahmat, "Analisis Financial Distress Menggunakan Model *Altman Z-Score*, *Springate Zmijewski*, *Grover* dan Penilaian Kesehatan Bank Metode Camel", *Jurnal Akuntansi Riset*, Vol.12, No. 1, 2020, h. 8.

daerah. Pemilihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penelitian ini didasari bahwa Provinsi tersebut merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang cukup baik dan iklim usaha yang kondusif, yang memungkinkan dilakukan pengujian terhadap ketahanan internal BPRS di bawah kondisi makroekonomi yang tidak stabil.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka dapat disimpulkan judul untuk penelitian ini sebagai berikut: “Analisis Kebangkrutan Dengan Metode Altman, Zmijewski, dan Grover Pada BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2022-2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024 yang berpotensi untuk bangkrut?
2. Apakah terdapat perbedaan hasil analisis prediksi kebangkrutan antara metode Altman dengan metode Zmijewski, metode Altman dengan metode Grover, serta metode Zmijewski dengan metode Grover pada BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di OJK periode 2022–2024?
3. Apakah terdapat perbedaan dari hasil analisis kebangkrutan dengan menggunakan Metode Altman, Zmijewski, dan Grover secara keseluruhan pada BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024 yang berpotensi untuk bangkrut.
2. Untuk mengetahui perbedaan hasil analisis prediksi kebangkrutan antara metode Altman dengan metode Zmijewski, metode Altman dengan metode Grover, serta metode Zmijewski dengan metode Grover pada BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di OJK periode 2022–2024.
3. Untuk mengetahui perbedaan dari hasil analisis kebangkrutan dengan menggunakan Metode Altman, Zmijewski, dan Grover secara keseluruhan pada BPRS di D.I Yogyakarta yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024.

D. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi fokus pada analisis kebangkrutan pada BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2022-2024. Peneliti menggunakan tiga metode analisis kebangkrutan, yaitu Altman, Zmijewski, dan Grover, untuk membandingkan hasil prediksi kondisi keuangan BPRS. Tujuan pembandingan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan klasifikasi kondisi keuangan antar metode, serta mengidentifikasi BPRS yang terindikasi dalam kondisi rawan atau berpotensi mengalami kebangkrutan. Periode 2022–2024 dipilih karena merupakan waktu dengan data terbaru dan relevan, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi BPRS yang aktual.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi BPRS penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam menggunakan model prediksi kebangkrutan yang tepat dalam menilai kondisi keuangan BPRS yang berpotensi mengalami kebangkrutan.
2. Bagi nasabah BPRS diharapkan dapat memberikan informasi bagi para nasabah dalam melakukan kegiatan BPRS.
3. Bagi Akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan informasi tentang metode kebangkrutan yang tepat dalam melakukan analisis terhadap kebangkrutan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan ini dan tersusun secara sistematis, penulis membuat sistematika yang diurutkan berdasarkan bab-bab berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini berisi teori dari permasalahan yang diteliti.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian, jenis, subjek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan teknik analisis data